

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan menunjukkan hasil kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi keuangan perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Hasil yang disajikan didalam laporan keuangan yang mempengaruhi yang menjadi keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan tersebut terdapat pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal seperti pihak manajemen perusahaan tersebut sedangkan pihak eksternal meliputi investor, kreditur, bankers. Untuk dilakukannya pengambilan keputusan ekonomi dalam melakukan investasi, informasi laba merupakan sangat penting bagi para calon investor dengan tujuan untuk mengetahui kualitas laba perusahaan yang didapat. Karena nominal laba yang disajikan, dianggap sebagai menunjukkan kinerja manajemen perusahaan, sehingga para calon investor dapat mengurangi resiko dari laporan keuangan yang telah disajikan.

Di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, perusahaan dihadapkan oleh persaingan yang ketat untuk tetap dapat eksis didalam pasar global, khususnya untuk industri dengan sub sektor *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka untuk menjadi yang perusahaan unggul dalam bersaing. Perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan yang kompetitif daripada perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumen, akan tetapi perusahaan juga harus bisa mengelola keuangannya dengan baik. Yang artinya, kebijakan yang diberlakukan dalam pengelolaan keuangan perusahaan harus dapat menjamin keberlangsungan hidup usaha yang dijalankan perusahaan dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan besar-kecilnya laba yang diperoleh perusahaan.

Selain hal itu, yang terlansir pada www.pajak.go.id Pemerintah Indonesia melakukan reformasi pajak kembali di tahun 2008 dan berlaku efektif mulai tahun 2009 dengan menerbitkan UU baru namun hanya untuk mengganti atau menyemournakan UU yang sudah ada. Karena adanya perubahan tentang pajak, ini seringkali yang menjadi salah satu faktor motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akan disajikan sehingga dapat dilakukannya dengan cara menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Untuk membuat manajemen laba, perusahaan memanfaatkan peluang dengan membuat estimasi akuntansi dan pemilihan metode akuntansi berdasarkan PSAK yang mengizinkan manajemen perusahaan untuk melakukan judgement terhadap estimasi akuntansi, seperti estimasi piutang tak tertagih, masa manfaat aset tetap serta nilai sisa dari aset tetap tersebut dan untuk amortisasi aset tak berwujud. Sedangkan dalam peraturan perpajakan mengenai estimasi piutang tak tertagih tidak diizinkan sebagai untuk pengurang pendapatan dalam menghitung laba fiskal. Peraturan perpajakan juga telah mengatur untuk masa manfaat aset tetap dan aset tidak berwujud beserta tarif penyusutannya yang dibedakan berdasarkan pengelompokan jenis aset tersebut.

Karena adanya perbedaan metode perhitungan dan pencatatan antara akuntansi dengan perpajakan maka menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang dapat menimbulkan selisih besarnya laba yang diperoleh. Maka, perlu dilakukannya penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan dua koreksi yang dinamakan berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Pajak tangguhan merupakan perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi PPh yang timbul akan datang sebagai akibat adanya perbedaan nilai aset dengan beban antara perhitungan menurut akuntansi dengan menurut perpajakan.

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat dari adanya akumulasi kerugian fiskal yang belum dikompensasikan, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dengan adanya definisi tersebut maka terbentuk konsep mengenai pemulihan pada masa mendatang. Karna itu, terdapat dua kemungkinan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu perusahaan membayar pajaknya lebih kecil pada saat ini akan tetapi sebenarnya perusahaan juga berpotensi memiliki hutang pajak yang lebih besar pada masa yang akan datang, atau kebalikannya perusahaan membayar pajak lebih besar pada saat ini akan tetapi sebenarnya perusahaan pun berpotensi memiliki hutang pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah PPh yang terpulihkan pada periode akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari beban dalam perhitungan laba fiskal dan sisa kompensasi kerugian. Jika aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi dilakukan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang ditimbulkan karena adanya perbedaan antara laba akuntansi yaitu laba yang tertuang dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal dengan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang menjadi faktor manajemen perusahaan melakukan manajemen laba karena adanya beban pajak tangguhan yang dapat menurunkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Apabila peningkatan beban pajak tangguhan dalam suatu perusahaan tidak berkontribusi besar atau kurang efektif dalam meningkatkan praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang disebabkan karena adanya peraturan mengenai beban pajak tangguhan yang diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang dapat membatasi manajemen perusahaan untuk memilih kebijakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Dengan demikian, semakin besar beban pajak tangguhan maka semakin kecil yang dilakukan dalam praktik manajemen laba.

Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya cenderung melakukan perencanaan pajak dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga laba yang muncul kecil dan

pengenaan pajak perusahaan pun kecil. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan sekecil mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Untuk meminimumkan kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dengan aset pajak tangguhan merupakan hal yang berkesinambungan mengenai laba yang akan diperoleh perusahaan, manajer yang menginginkan besarnya laba akan lebih memilih untuk perencanaan pajak yang baik demi memastikan pajaknya rendah dengan keinginan laba yang besar serta aset pajak tangguhan dari hasil rekonsiliasi dapat dimanfaatkan perusahaan dimasa akan datang. Dengan harapan tersebut manajer dapat saja melakukan praktik manajemen laba.

Berikut contoh perusahaan terlansir dalam Devi (2018) yang melakukan praktik manajemen laba yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) melaporkan untuk laba bersih yang didapati ditahun 2011 sebesar Rp 323 Miliar, tahun 2012 sebesar Rp 363 Miliar, tahun 2013 sebesar 365 Miliar dan ditahun 2014 sebesar Rp 437 Miliar.

Selain itu, ada pula PT Pudjiadi Prestige Limited Tbk (PUDP) melaporkan bahwasannya laba bersih yang diperoleh pada tahun 2011 sebesar Rp 21 Miliar, tahun 2012 sebesar Rp 21,1 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp 26 Miliar dan ditahun 2014 sebesar Rp 15 Miliar. Hal ini terjadi merupakan laba perusahaan yang cenderung stabil dan tidak menunjukkan fluktuasi laba yang signifikan dan hal ini memungkinkan adanya praktik dalam perataan laba di perusahaan tersebut.

Terkait kasus perusahaan konstruksi dan bangunan yang terindikasi melakukan manajemen laba salah satu caranya dengan memperindah laporan keuangannya seperti PT Waskita Karya adanya kelebihan pencatatan pada laporan keuangannya pada tahun 2004-2008. Awal kasus ini terungkap pada saat pemeriksaan kembali pada neraca dalam rangka perdana penerbitan saham ditahun 2008. Direktur utama Waskita yang baru adalah M. Choliq yang sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, ia menemukan pencatatan yang tidak sesuai dengan menemukan kelebihan pencatatan sebesar Rp 400 Miliar. Direksi pada periode sebelumnya diduga telah melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004

hingga tahun 2008 dengan cara memasukan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai tahun tertentu.

Terkait kasus manajemen laba tersebut yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan telah dijelaskan sebelumnya dapat menimbulkan dampak negatif karena melakukan rekayasa laporan keuangan yang mengakibatkan hasil yang tidak wajar dan menutupi keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa hal untuk manajemen laba boleh dilakukan untuk tingkat level tertentu dengan memberikan informasi nilai keuangan yang baik dan efisien serta penggunaan metoda akuntansi yang sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan sehingga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan tidak merugikan pihak ketiga karna manajemen perusahaan melakukan manajemen laba.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, penulis memilih sub sektor *property, real estate and building construction* karena dalam pengenaan pajak final terdapat yang tidak bisa dibebankan dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Yang dimaksud final tersebut adalah selesai pada saat itu juga. Dasar PPh-nya berlaku tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menjelaskan bahwa klasifikasi dan tarif yang dikenakan ketika mendapatkan termin dalam suatu pengerjaan. Selain pajak final terdapat pajak penghasilan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan atau wajib pajak dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat telah dilakukannya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifada dan Wulandari (2015) menghasilkan bahwa variabel beban pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel ukuran perusahaan serta perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2018) mengatakan bahwa aset pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, akan tetapi perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Timurianan

dan Rizki (2015) mengatakan bahwa adanya pengaruh dari aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan dengan fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda dari setiap penelitiannya dengan menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pengaruh antar variabel, sehingga penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan periode saat ini pada tahun 2016-2019 karena penulis ingin mendapatkan data terbaru yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, sehingga penulis dapat mampu menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan akurat pada sub sektor *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka, penulis memandang fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali dengan judul :

**“PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan penulis antara lain:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada manajemen perusahaan dalam meningkatkan persepsi yang positif terhadap pelaporan keuangan yang dipublikasikan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui perbedaan temporer dan perencanaan pajak.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat terutama pada bidang perpajakan yang nantinya akan menjadi dasar bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

3. Bagi Peneliti

Bertambahnya wawasan peneliti khususnya mengenai perpajakan dan sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.